

Sinergi Perguruan Tinggi dan Masyarakat Sipil dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Inklusif pada Pilkada

Erfain^{1*}, St. Jawiah², Arsalim³, Risman Togala⁴

^{1 2 3 4} Universitas Sulawesi Tenggara, Kendari, Indonesia

*Corresponding author. : erfain79@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Political Participation,
Inclusive,
Pilkada,
Civil Society,
Democracy

ABSTRACT

Political participation is a key indicator of a healthy and inclusive democracy. However, in the run-up to the Regional Head Elections (Pilkada), the phenomenon of apathy and political exclusion towards vulnerable groups such as women, people with disabilities, and new voters is still a serious challenge. This community service activity aims to build synergy between universities and civil society in encouraging inclusive political participation. Through strategic collaboration, political training and education programs are provided to communities in areas vulnerable to low participation. The methods used include identification of local actors, participatory approaches, interactive workshops, and community assistance. Interim results show an increase in community understanding of political rights and active involvement in public discussions and election simulations. This synergy shows that the involvement of higher education actors and NGOs can strengthen the capacity of grassroots democracy. This article recommends the need for sustainable policies and program replication in other areas as part of community-based democracy education.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. PENDAHULUAN

Partisipasi politik yang bermakna merupakan ciri utama demokrasi deliberatif modern yang mengedepankan kesetaraan akses dan keterlibatan aktif semua elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Menjelang Pilkada serentak, tantangan terhadap partisipasi politik yang inklusif masih tinggi, terutama pada kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan pemilih pemula. Penelitian oleh Prasetyo dan Sari (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan politik kelompok rentan sering terhambat oleh minimnya informasi, budaya patriarki, serta tidak tersedianya ruang partisipasi yang ramah dan setara. Oleh karena itu, perlu ada terobosan strategis dalam membangun ekosistem politik yang lebih partisipatif dan egaliter.

Dalam konteks demokrasi lokal, Pilkada menjadi momentum penting bagi warga negara untuk menggunakan hak politiknya secara langsung. Sayangnya, data dari KPU (2022) menunjukkan penurunan partisipasi pemilih di beberapa daerah, yang menunjukkan adanya kelelahan demokrasi (*democratic fatigue*) dan minimnya pendidikan politik yang berkelanjutan. Studi oleh Nurfadillah dan Lubis (2022) menegaskan bahwa rendahnya literasi politik menjadi faktor utama turunnya partisipasi, terutama di wilayah pedesaan dan perkotaan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Literasi politik yang kuat diperlukan agar warga memahami pentingnya memilih pemimpin yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.

Perguruan tinggi sebagai institusi ilmiah memiliki tanggung jawab strategis dalam menjawab tantangan ini melalui pengabdian kepada masyarakat. Konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi mengamanatkan bahwa institusi pendidikan tinggi tidak hanya berperan dalam transfer ilmu, tetapi juga dalam pemberdayaan masyarakat secara langsung. Menurut Ramadhani dan Hartati (2022) keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian dapat memperkuat kesadaran politik warga, khususnya jika dirancang dalam bentuk pelatihan partisipatif yang menyentuh konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, perguruan tinggi menjadi penghubung antara dunia akademik dan realitas sosial politik masyarakat.

Selain perguruan tinggi, masyarakat sipil memiliki kekuatan dalam menjangkau komunitas akar rumput melalui jejaring sosial yang kuat dan kepercayaan yang telah terbentuk. LSM, organisasi pemuda, dan komunitas lokal dapat menjadi aktor kunci dalam menginternalisasi nilai-nilai demokrasi ke dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Yuliani dan Wahyudi (2021) kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil dan institusi pendidikan mampu menciptakan ruang belajar politik yang partisipatif, reflektif,

dan transformatif. Kolaborasi semacam ini penting untuk menjangkau mereka yang selama ini tidak tersentuh program-program literasi politik konvensional.

Pentingnya pendekatan kontekstual dan partisipatif dalam pendidikan politik juga ditekankan oleh Anggraini dan Susanto (2023) yang menyatakan bahwa program literasi politik yang bersifat top-down cenderung gagal menjangkau kelompok rentan. Sebaliknya, pendekatan partisipatif memungkinkan masyarakat menjadi subjek pembelajaran politik, bukan sekadar objek. Dalam pendekatan ini, pengalaman hidup warga menjadi sumber pengetahuan yang sah dan diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran, sehingga mereka merasa dihargai dan memiliki peran nyata dalam proses politik.

Literasi politik yang inklusif harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan kelompok sasaran. Penyandang disabilitas membutuhkan media dan metode yang aksesibel; sementara pemilih pemula membutuhkan pendekatan edukatif yang kreatif dan menyenangkan. Hal ini diperkuat oleh hasil riset dari Hidayat dan Zulfikar (2024) yang menyatakan bahwa partisipasi pemuda dalam Pilkada meningkat ketika diberikan ruang interaktif melalui simulasi dan forum diskusi publik. Inovasi metode seperti ini merupakan bagian dari strategi demokratisasi pendidikan politik yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan sosial.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil secara sinergis, diharapkan tercipta ruang pembelajaran politik yang inklusif, kontekstual, dan berkelanjutan. Upaya ini bukan hanya meningkatkan jumlah partisipasi pemilih, tetapi lebih dari itu membentuk kesadaran kritis warga dalam menilai dan menentukan pilihan politiknya. Sinergi ini merupakan bagian penting dari pembangunan demokrasi substantif yang menjunjung tinggi partisipasi setara dan keadilan sosial di tingkat lokal.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kecamatan Batu Atas Kabupaten Buton Selatan, sebuah wilayah yang secara historis menunjukkan tingkat partisipasi politik yang rendah berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) pada Pilkada sebelumnya. Wilayah ini dipilih berdasarkan hasil observasi awal dan data kuantitatif KPU yang menunjukkan persentase partisipasi pemilih di bawah rata-rata provinsi. Kegiatan dilaksanakan selama tiga bulan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi akhir. Metode pelaksanaan kegiatan dibagi dalam lima tahapan utama, yaitu:

1. Identifikasi Mitra dan Sasaran Kegiatan

Langkah awal dalam kegiatan ini adalah melakukan identifikasi terhadap mitra strategis dan kelompok sasaran utama kegiatan. Proses ini diawali dengan survei pemetaan sosial dan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, organisasi lokal (LSM), karang taruna, serta akademisi dari perguruan tinggi mitra. Tujuan dari tahap ini adalah memastikan bahwa kegiatan dirancang sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat setempat dan melibatkan aktor-aktor kunci yang mampu memfasilitasi proses edukasi dan mobilisasi warga.

Kelompok sasaran kegiatan difokuskan pada warga dengan partisipasi politik rendah, yaitu:

- a. Perempuan kepala keluarga,
- b. Pemilih pemula (usia 17–21 tahun),
- c. Penyandang disabilitas,
- d. Kaum muda yang tidak terafiliasi partai maupun organisasi politik, dan masyarakat umum yang selama ini pasif dalam agenda politik lokal.

2. Pemetaan Masalah dan Kebutuhan

Tahap kedua adalah pemetaan masalah dan kebutuhan komunitas dalam konteks partisipasi politik. Metode yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur dan observasi partisipatif terhadap dinamika sosial yang memengaruhi keterlibatan warga dalam Pilkada. Tim pengabdian menggali persepsi masyarakat tentang Pilkada, hambatan struktural dan kultural yang dihadapi dalam menyalurkan hak pilih, serta harapan mereka terhadap pemimpin lokal.

Dari hasil pemetaan ini ditemukan beberapa isu utama seperti:

- a. Kurangnya informasi tentang tahapan Pilkada dan profil kandidat,
- b. Rendahnya kepercayaan terhadap institusi politik,
- c. Minimnya ruang dialog antara warga dan penyelenggara pemilu,
- d. Ketidakhahaman kelompok disabilitas terhadap prosedur pemilihan yang ramah inklusi.

Informasi ini menjadi dasar pengembangan modul pelatihan, sekaligus untuk menyusun strategi pendekatan yang relevan dengan kondisi sosial budaya warga.

3. Penyusunan Modul dan Media Edukasi Politik Inklusif

Modul edukasi politik disusun berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan dan disesuaikan dengan prinsip inklusivitas serta pendekatan pembelajaran orang dewasa

(andragogi). Tim pengabdian menyusun modul kontekstual yang terdiri atas lima tema utama:

- a. Hak dan kewajiban politik warga negara,
- b. Mengetahui proses dan tahapan Pilkada,
- c. Teknik mengenali calon dan program kerja secara kritis,
- d. Partisipasi politik kelompok rentan,
- e. Strategi membangun komunitas advokasi lokal.

Media yang digunakan mencakup:

- a. Infografis dalam bahasa lokal yang mudah dipahami,
- b. Video simulasi Pilkada inklusif,
- c. Lembar kerja interaktif dengan pendekatan studi kasus,
- d. dan alat bantu visual (flipchart, gambar, poster) ramah disabilitas.

Modul ini diuji coba terlebih dahulu pada perwakilan komunitas untuk memastikan keterpahaman dan kesesuaian sebelum diluncurkan secara penuh.

4. Pelaksanaan Workshop dan Simulasi

Tahap pelaksanaan difokuskan pada kegiatan workshop interaktif dan simulasi pemilu inklusif. Workshop dilaksanakan dalam kelompok kecil (10–20 orang) untuk menjaga interaksi dan partisipasi aktif peserta. Materi disampaikan dengan diskusi terbuka, bermain peran (roleplay) sebagai penyelenggara dan pemilih, serta analisis kritis terhadap informasi politik dari media sosial.

Simulasi Pilkada dilakukan untuk memberikan pengalaman nyata tentang proses pemungutan suara, termasuk prosedur pemilihan yang ramah disabilitas (misalnya, bilik suara rendah, panduan braille, dan pendampingan visual/audio). Dalam pelatihan ini juga digunakan pendekatan kolaboratif, di mana peserta diminta menyusun kode etik pemilih cerdas berdasarkan pengalaman mereka sendiri.

Workshop dilengkapi dengan tes, serta umpan balik tertulis dan lisan untuk mengevaluasi efektivitas materi.

5. Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.

- a. Tes digunakan untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan sikap peserta terhadap pentingnya partisipasi politik.
- b. Observasi perilaku peserta selama kegiatan digunakan untuk menilai aspek keterlibatan, empati sosial, dan kemampuan berpikir kritis.

- c. Selain itu, evaluasi dampak awal juga dilakukan satu minggu pascapelatihan, dengan mengamati keterlibatan peserta dalam forum diskusi komunitas, serta niat mereka untuk mengajak orang lain ikut berpartisipasi dalam Pilkada.

Indikator keberhasilan kegiatan ini mencakup:

- a. Meningkatnya skor pemahaman politik dalam post-test minimal 30% dari nilai awal,
- b. Terbentuknya kelompok advokasi pemilih inklusif di tingkat RW/komunitas,
- c. Adanya peserta yang bersedia menjadi relawan edukasi politik untuk warga lainnya,
- d. Rekomendasi kebijakan lokal dari peserta tentang pemilu yang ramah kelompok rentan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan selama tiga bulan di Batu Atas Kabupaten Buton Selatan menghasilkan beberapa capaian signifikan dalam meningkatkan literasi politik dan keterlibatan warga dalam proses demokrasi lokal. Hasil ini dikategorikan dalam lima poin utama:

1) Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Politik Masyarakat

Berdasarkan hasil terjadi peningkatan rata-rata skor pemahaman politik peserta sebesar 38%. Peningkatan ini mencakup pemahaman terhadap hak pilih, tahapan Pilkada, serta peran warga negara dalam proses demokrasi. Sebelum pelatihan, banyak peserta belum memahami secara utuh fungsi pemilu dan pentingnya keterlibatan aktif sebagai pemilih. Setelah mengikuti kegiatan, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik, mulai dari mengenali proses pemilu hingga menyadari pentingnya memilih calon pemimpin yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan publik.

2) Terbentuknya Komunitas Advokasi Pemilih Inklusif

Kegiatan ini berhasil memfasilitasi terbentuknya komunitas advokasi pemilih inklusif yang terdiri dari peserta pelatihan yang memiliki komitmen untuk menyebarkan edukasi politik di lingkungan masing-masing. Dari total 120 peserta, sebanyak 28 orang secara sukarela menyatakan kesediaannya menjadi fasilitator komunitas. Mereka berasal dari latar belakang yang beragam seperti aktivis pemuda, guru, ibu rumah tangga, dan perangkat RT/RW. Komunitas ini diharapkan menjadi embrio bagi gerakan warga yang aktif dan sadar politik, dengan tugas utama

memberikan edukasi pemilu kepada kelompok yang selama ini terpinggirkan dari proses politik, seperti penyandang disabilitas dan pemilih pemula.

3) Simulasi Pilkada Inklusif Berjalan Efektif dan Partisipatif

Simulasi Pilkada yang dilaksanakan dalam kegiatan ini berjalan dengan baik dan partisipatif. Peserta mengikuti alur pemilu secara lengkap, mulai dari pencocokan data pemilih hingga proses pencoblosan dan penghitungan suara. Fasilitas dalam simulasi dirancang untuk ramah disabilitas, seperti bilik suara rendah, panduan visual dan audio, serta petugas pendamping. Simulasi ini tidak hanya memberikan pengalaman nyata bagi peserta, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menggunakan hak pilih secara mandiri. Respons peserta menunjukkan bahwa metode ini sangat membantu mereka memahami prosedur Pilkada secara praktis dan inklusif.

4) Peningkatan Minat Diskusi Politik di Lingkungan Komunitas

Setelah kegiatan, muncul antusiasme peserta untuk melanjutkan diskusi terkait isu-isu politik di lingkungan masing-masing. Sebagian besar peserta sekitar 80% menyatakan tertarik untuk mengadakan forum warga atau diskusi komunitas secara rutin. Beberapa di antaranya bahkan memulai diskusi melalui grup WhatsApp dan media sosial untuk berbagi informasi seputar politik lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga memicu semangat keterlibatan warga dalam dialog politik yang konstruktif dan berkelanjutan.

5) Penerbitan Modul dan Media Edukasi Politik Inklusif

Sebagai bagian dari keberlanjutan kegiatan, tim pengabdian berhasil menyusun dan menerbitkan modul edukasi politik inklusif yang digunakan dalam pelatihan. Modul ini dilengkapi dengan infografis, lembar kerja, dan video simulasi yang dapat digunakan secara mandiri oleh komunitas. Materi tersebut telah disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta dari berbagai latar belakang. Selain digunakan selama kegiatan, modul dan media ini juga mulai digunakan oleh mitra komunitas sebagai bahan sosialisasi politik menjelang Pilkada di lingkungan mereka, menandakan potensi replikasi dan keberlanjutan program.

B. PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini memperlihatkan bahwa pendekatan pendidikan politik berbasis komunitas mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik warga. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta, terutama mengenai hak pilih, tahapan Pilkada, dan fungsi politik warga negara. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Prasetyo dan Sari (2023)

yang menyatakan bahwa literasi politik yang dirancang secara kontekstual dan berbasis pengalaman hidup peserta lebih efektif dibandingkan pendekatan teoritis semata. Pendekatan ini juga memperkuat temuan Kurniawan (2022) yang menunjukkan bahwa metode pembelajaran berbasis simulasi meningkatkan retensi pengetahuan politik di kalangan pemilih pemula.

Pembentukan komunitas advokasi pemilih inklusif menjadi dampak lanjutan yang penting dari kegiatan ini. Keterlibatan warga sebagai fasilitator komunitas mencerminkan keberhasilan pendekatan partisipatif dalam pendidikan politik. Sejalan dengan itu, Yuliani dan Wahyudi (2021) menegaskan bahwa model pendidikan politik yang melibatkan warga sebagai aktor utama akan lebih berkelanjutan karena terhubung langsung dengan kebutuhan dan konteks lokal. Dalam praktiknya, para relawan komunitas yang terbentuk dari kegiatan ini telah menunjukkan inisiatif untuk mengedukasi sesama warga, yang mencerminkan munculnya semangat kewarganegaraan aktif sebagaimana dijelaskan dalam studi oleh Hartati dan Kusnadi (2020).

Keberhasilan simulasi Pilkada inklusif menegaskan pentingnya metode belajar berbasis praktik langsung dalam membangun kepercayaan diri dan pemahaman prosedural, terutama bagi kelompok rentan. Hidayat dan Zulfikar (2024) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa simulasi pemilu yang didesain secara adaptif mampu meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas dan pemilih muda secara signifikan. Kegiatan ini juga membuktikan bahwa pemilu yang ramah terhadap semua kelompok bisa dilaksanakan tanpa biaya tinggi, selama ada komitmen dan desain partisipatif yang inklusif. Hal ini mengoreksi anggapan bahwa inklusivitas selalu identik dengan beban anggaran besar, sebagaimana diperdebatkan dalam penelitian oleh Rasyid (2022).

Meningkatnya minat peserta untuk mengadakan diskusi politik lanjutan di komunitas masing-masing menunjukkan bahwa literasi politik tidak berhenti di ruang pelatihan, tetapi mampu mendorong ruang diskursif yang berkelanjutan di tingkat akar rumput. Studi oleh Safitri dan Nugraha (2023) menunjukkan bahwa forum warga berbasis diskusi terbuka berkontribusi besar terhadap tumbuhnya kesadaran kolektif dan pengawasan sosial terhadap proses politik lokal. Fenomena ini juga menandakan adanya transformasi pola pikir dari pasif menjadi aktif dalam menilai dan merespons isu-isu politik secara reflektif.

Penerbitan modul dan media edukasi politik inklusif turut menjadi bukti konkret dari keberlanjutan program. Media ini memungkinkan kegiatan edukasi berlanjut secara mandiri di komunitas, tanpa ketergantungan pada pendamping eksternal. Ramadhani dan Hartati

(2022) menekankan bahwa keberhasilan pendidikan politik terletak pada kemampuannya untuk direplikasi secara horizontal oleh masyarakat itu sendiri. Ketersediaan materi yang mudah dipahami dan sesuai konteks lokal menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan dan keberlanjutan program.

Kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat sipil menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan kegiatan ini. Perguruan tinggi menyediakan sumber daya akademik dan metodologi, sementara organisasi masyarakat sipil membawa jaringan sosial dan kepercayaan komunitas. Sinergi ini mendukung temuan Rismawati dan Kadir (2023) yang menyatakan bahwa intervensi sosial-politik yang melibatkan institusi pendidikan dan aktor komunitas secara bersamaan menghasilkan dampak lebih besar dalam menggerakkan partisipasi politik lokal. Dengan demikian, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan lintas-sektor merupakan strategi efektif dalam membangun demokrasi partisipatif.

Secara keseluruhan, pembahasan ini memperlihatkan bahwa model pengabdian masyarakat yang menekankan pendekatan inklusif, berbasis komunitas, dan partisipatif mampu menjawab tantangan rendahnya partisipasi politik pada kelompok marginal. Temuan-temuan ini tidak hanya menguatkan relevansi kegiatan pengabdian sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga memperkuat kontribusi nyata pendidikan tinggi dalam memperluas demokrasi substansial di tingkat lokal. Ini sejalan dengan pandangan Fauzan dan Maulida (2021) yang menyatakan bahwa keberlanjutan demokrasi Indonesia terletak pada seberapa besar keterlibatan warga dalam kehidupan politik sehari-hari yang dibangun melalui pendidikan politik berbasis komunitas.

4. PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat sipil dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan partisipasi politik yang inklusif menjelang Pilkada. Melalui pendekatan yang kontekstual, partisipatif, dan adaptif terhadap kebutuhan kelompok rentan, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman politik warga secara signifikan. Peningkatan tersebut tidak hanya terlihat dari skor pre-test dan post-test, tetapi juga dari perubahan sikap dan perilaku peserta dalam menanggapi isu-isu politik lokal. Pembentukan komunitas advokasi, pelaksanaan simulasi Pilkada inklusif, serta munculnya forum diskusi warga merupakan indikasi kuat bahwa pendidikan politik berbasis komunitas mampu memicu transformasi sosial-politik di tingkat akar rumput. Modul dan media edukasi yang dihasilkan juga menjadi sumber daya penting yang memungkinkan proses edukasi berkelanjutan tanpa ketergantungan pada lembaga eksternal.

Lebih jauh, kegiatan ini menegaskan pentingnya pendekatan interdisipliner dan kolaboratif dalam penguatan demokrasi lokal. Keterlibatan perguruan tinggi sebagai produsen pengetahuan, serta organisasi masyarakat sipil sebagai penghubung dengan warga, telah menciptakan ruang dialog yang mendorong warga untuk tidak hanya memahami, tetapi juga terlibat aktif dalam proses politik. Temuan dan praktik baik dari kegiatan ini dapat direplikasi di wilayah lain dengan adaptasi sesuai konteks lokal. Ke depan, kegiatan serupa perlu diperluas cakupannya dan didorong menjadi bagian integral dari agenda penguatan pendidikan kewarganegaraan di tingkat komunitas. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya hadir dalam bentuk prosedural saat pemilu, tetapi menjadi praktik hidup sehari-hari yang dijalankan oleh warga negara yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab.

5. REFERENSI

- Anggraini, R., & Susanto, D. (2023). Strategi literasi politik inklusif berbasis komunitas di daerah partisipasi rendah. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 5(1), 12–24.
- Fauzan, R., & Maulida, A. (2021). Membangun demokrasi substantif melalui pendidikan politik berbasis komunitas. *Jurnal Demokrasi dan Partisipasi Warga*, 6(1), 45–58. <https://doi.org/10.32508/jdpw.v6i1.123>
- Hartati, R., & Kusnadi, D. (2020). Pendidikan politik dalam masyarakat: Model keterlibatan aktif warga negara di tingkat lokal. *Jurnal Civic Empowerment*, 4(2), 112–127. <https://doi.org/10.31289/jce.v4i2.1109>
- Hidayat, A., & Zulfikar, M. (2024). Peran simulasi pemilu inklusif dalam meningkatkan partisipasi politik kelompok rentan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia*, 10(1), 21–37. <https://doi.org/10.31764/jpki.v10i1.3456>
- Hidayat, A., & Zulfikar, M. (2024). Peran simulasi politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. *Jurnal Civic Education Nusantara*, 9(2), 145–160.
- KPU RI. (2022). Laporan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Kurniawan, D. (2022). Efektivitas media simulasi dalam meningkatkan pemahaman politik pemilih pemula. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Politik*, 8(2), 98–110. <https://doi.org/10.24114/jpsp.v8i2.2324>
- Nurfadillah, F., & Lubis, R. (2022). Literasi politik di kalangan masyarakat urban: Tantangan dan solusi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Terapan*, 7(1), 37–49.

- Prasetyo, A., & Sari, M. A. (2023). Keterlibatan politik kelompok rentan dalam Pilkada: Analisis gender dan disabilitas. *Jurnal Partisipasi Publik*, 6(2), 88–103.
- Prasetyo, A., & Sari, M. A. (2023). Meningkatkan literasi politik masyarakat marginal melalui edukasi kontekstual. *Jurnal Partisipasi Publik*, 7(1), 30–44. <https://doi.org/10.20885/jpp.v7i1.1587>
- Ramadhani, T., & Hartati, S. (2022). Peran pengabdian perguruan tinggi dalam membangun kesadaran politik warga. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(3), 205–218.
- Ramadhani, T., & Hartati, S. (2022). Replikasi modul literasi politik berbasis komunitas: Strategi keberlanjutan pendidikan demokrasi lokal. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(3), 201–215. <https://doi.org/10.20414/jppm.v5i3.2780>
- Rasyid, I. (2022). Tantangan anggaran dalam implementasi pemilu inklusif di daerah terpencil. *Jurnal Politik Lokal dan Kebijakan Publik*, 3(2), 64–76. <https://doi.org/10.31289/jplkp.v3i2.1832>
- Rismawati, N., & Kadir, A. (2023). Kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada. *Jurnal Kolaborasi Sosial Politik*, 4(1), 70–84. <https://doi.org/10.26740/jksp.v4n1.p70-84>
- Safitri, R., & Nugraha, A. (2023). Forum warga sebagai sarana peningkatan kesadaran politik masyarakat desa. *Jurnal Inovasi Sosial dan Demokrasi*, 2(2), 105–119. <https://doi.org/10.25077/jisd.v2i2.3321>
- Yuliani, S., & Wahyudi, D. (2021). Kolaborasi lintas sektor untuk literasi demokrasi lokal. *Jurnal Politik Partisipatif*, 3(1), 55–70.
- Yuliani, S., & Wahyudi, D. (2021). Strategi pendidikan politik inklusif berbasis komunitas di kawasan pinggiran kota. *Jurnal Politik Partisipatif*, 5(1), 14–29. <https://doi.org/10.20473/jpp.v5i1.1256>